

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)**

THE INFLUENCE OF APPLICATION OF THE REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM, GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS, AND HUMAN RECOURCES COMPETENCE ON THE QUALITY OF THE REGIONAL GOVERNMENT'S FINANCIAL STATEMENTS (ON THE WORK UNIT OF THE CITY OF BANDUNG)

Divia Mahdalena Mahtovani¹, Dini Wahjoe Hapsari, SE., Ak, CA.,M.Si²

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom
¹dvaxxv@student.telkomuniversity.ac.id, ²dinihapsari@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang sudah dipercayakan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan yang arah yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif-verifikatif bersifat kausal. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner (data primer) yang telah diolah oleh penulis dengan menggunakan skala *likert* serta sampel yang digunakan sebanyak 62 responden yang dipilih melalui metode sampling sensus. Data di dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda melalui *software* IBM SPSS 25.0.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasil pengujian menunjukkan adanya pengaruh secara simultan antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak memiliki pengaruh positif secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata kunci: sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia

Abstract

The government's financial statements aim to present information that is useful in decision making as well as showing the accountability of the reporting entity for the resources that have been entrusted. Quality local government financial reports can help the government in making better decisions. This study aims to explain the effect of the application of regional financial accounting systems, government accounting standards, and human resource competencies on the quality of local government financial reports.

The type of research used is descriptive-verification research is causal. This research is a quantitative study using a questionnaire (primary data) that has been processed by the author using a Likert scale and the sample used by 62 respondents selected through the census sampling method. The data in this study used multiple linear regression analysis through IBM SPSS 25.0 software.

Based on the results of tests that have been carried out, the test results indicate a simultaneous influence between the Application of the Regional Financial Accounting System, Government Accounting Standards, and Human Resources Competence on the Quality of Regional Government Financial Statements. Based on the partial test results, the Application of the Regional Financial Accounting System and Government Accounting Standards has a partially positive effect on the quality of the Regional Government's Financial Statements. However, Human Resources Competency does not have a partial positive effect on the Quality of Regional Government Financial Reports.

Keywords: regional financial accounting systems, government accounting standards, and human resource competencies

1. Pendahuluan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan organisasi/lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. SKPD menjadi pemeran utama dalam hal menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyusunan akhir Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD).

Laporan keuangan pemerintah mempunyai tujuan dalam menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan mengenai posisi laporan keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan serta pelaporan sumber daya yang telah diberikan. Oleh karena itu, penyajian informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan harus sangat diperhatikan agar dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Informasi yang dibutuhkan juga harus memiliki beberapa karakteristik yang sudah ditetapkan dalam PP 71 tahun 2010 mengenai kriteria yang sudah disesuaikan dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan oleh pengguna.

Terkait dengan adanya perubahan regulasi pada penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pada tahun 2013 terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015. Dalam hal ini, pemerintah diharuskan mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan informasi keuangan yang berkualitas. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional merupakan suatu syarat dalam rangka meningkatkan suatu penyelenggaraan negara serta kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan hal utama dalam mendukung dan menjalankan suatu kegiatan pertanggungjawaban pelaporan keuangan pemerintah pusat/daerah. Selain itu, SAKD dan SAP juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan serta apakah laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

2. Teori

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Pemerintah Daerah

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. Selanjutnya, Pemerintah Daerah dalam pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dengan diberikannya otonomi daerah, suatu daerah dapat leluasa dalam mengatur sendiri aturan di dalam daerahnya. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat serta diharapkan dapat membangun dan mengurus pembangunan daerah itu sendiri untuk lebih fokus dan maju.

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa Akuntansi Sektor Publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Pada awalnya, Akuntansi Sektor Publik merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Akan tetapi, perkembangan Akuntansi Sektor Publik saat ini sedang mengalami proses disiplin untuk menjadi ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansi keberadaannya. Akuntansi Sektor Publik memiliki tujuan yang dinyatakan oleh *American Accounting Association* (1970) dalam Glynn (1993) yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomi atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang sudah diberikan.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan mengenai program dan penggunaan sumber daya yang telah dijalankan secara tepat dan efektif serta memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik kepada masyarakat.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang tersruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, bendahara umum negara, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah/pusat. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan menghasilkan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara umum, laporan keuangan memiliki peran prediktif dan prospektif, dimana laporan keuangan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

Karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No. 71 Tahun 2010). Berikut merupakan empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan pilihan teknik dan prosedur akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, serta penyajian laporan keuangan. Dalam pasal 51 UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa akuntansi memiliki peran penting bagi pemerintah daerah yaitu setiap Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (selaku Bendahara Umum Daerah) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (selaku Pengguna Anggaran) harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas, termasuk transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang berada di dalam tanggung jawabnya.

Dalam pelaksanaannya, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki prosedur yang diperlukan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Kementerian Dalam Negeri Indonesia No. 29 Tahun 2002, prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu:

1. Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan *cash basis* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan *accrual basis* untuk pengakuan aset.

2. Penggolongan dan pengikhtisaran, adanya penjurnalan dan melakukan *posting* ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Subang.
3. Pelaporan, setelah semua proses di atas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Pihak-pihak yang memerlukannya antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Badan Pengawasan Keuangan (BPK); investor; kreditor; donator; Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah; rakyat; Pemerintah Daerah lain; dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pada akhir tahun 2013, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruaI mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBN/APBD. Pada tahun 2015, seluruh instansi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah harus sudah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akruaI. Menurut Marja Sinurat (2018) menyebutkan bahwa akuntansi akruaI memberikan informasi biaya penuh dari aktivitas pemerintah, sehingga pemerintah dapat melakukan hal sebagai berikut:

1. Menghitung biaya-biaya sebagai konsekuensi dari sebuah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan biaya dari mekanisme alternatif untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Memutuskan apakah akan memproduksi pelayanan sendiri di dalam pemerintahan, atau membeli barang dan jasa secara langsung dari organisasi non-pemerintah.
3. Memutuskan apakah pengguna akan dibebani biaya dengan layanan yang diberikan.
4. Mengalokasi tanggung jawab untuk pengelolaan biaya tertentu.

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akruaI dapat memberikan kerangka yang konsisten untuk pengidentifikasian utang-utang yang ada dan utang-utang potensial atau utang-utang kontinjen. Akuntansi akruaI juga akan menyoroti pengaruh dari keputusan keuangan terhadap aset atau ekuitas (kekayaan bersih) dan memungkinkan pemerintah untuk melihat gambaran yang lebih panjang ketika membuat keputusan keuangan dibandingkan bila menggunakan informasi yang dihasilkan dari basis kas atau basis kas modifikasian. Akuntansi akruaI dapat memberikan informasi mengenai apakah sub-entitas telah memberikan pelayanan-pelayanan tertentu dalam anggaran yang sudah disetujui. Informasi yang sama, pada level yang lebih detil, dapat juga digunakan dalam sub-entitas untuk mengelola aktivitas dan biaya-biaya program.

2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan peranan terpenting atas keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional untuk mencapai tujuan dari usaha kegiatan pemerintah. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan kompetensi kerja sebagai kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam mendapatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan terkait dengan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan serta memperoleh pegawai yang profesional dengan berkriteria pintar, memiliki kompetensi serta terampil, kreatif, memiliki akhlak dan moral yang tinggi, dapat bekerja sama, serta dapat bekerja keras. Menurut Hutapea dan Thoha (2008: 28) dalam Saleba (2014), kompetensi memiliki tiga kriteria yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan berlangsungnya Sumber Daya Manusia, yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*)
Pengetahuan adalah informasi yang telah didapatkan seseorang dari pemahaman dan potensi terhadap suatu hasil pengenalan objek. Pengetahuan yang dimiliki pegawai akan menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan.
2. Keterampilan (*skills*)
Keterampilan merupakan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan ide, kreatifitas, akal, dan pikiran untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna dan dapat menghasilkan sesuatu dengan kualitas yang baik.
3. Perilaku (*attitude*)

Menurut Oktaviana (2015) perilaku adalah suatu tindakan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan, dari perilaku yang terlihat sampai tidak terlihat atau dirasakan sampai tidak dirasakan. Perilaku dibagi menjadi dua jenis yaitu perilaku sadar dan perilaku tidak sadar. Perilaku sadar adalah perilaku yang terjadi dengan melalui kesadaran serta kerja otak dan saraf, sedangkan perilaku tidak sadar adalah perilaku yang terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya kesadaran dari dalam diri.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

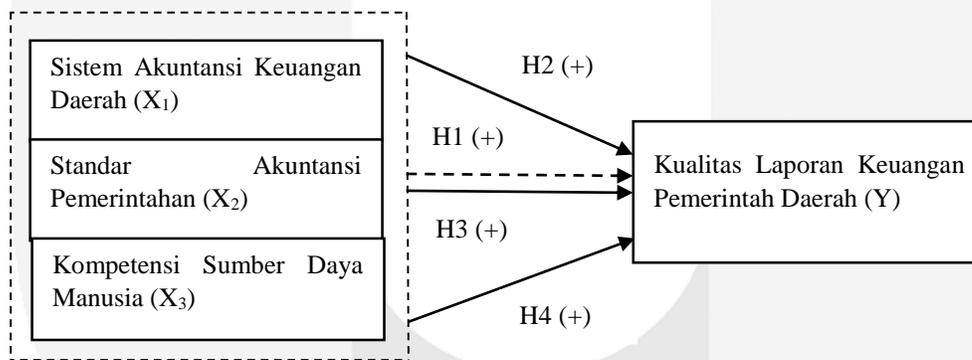
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Novtania; Linda; dan Winston (2017) yang menyatakan bahwa Pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang telah diatur Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, sehingga dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik dan benar dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

2.2.2 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Yasma, Noer, dan Andy (2019) yang menyatakan bahwa hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan menunjukkan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, Standar Akuntansi Pemerintahan harus diterapkan agar tercipta laporan keuangan yang berkualitas, relevan, handal, dan baik bagi masyarakat.

2.2.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Made; I Gusti; dan I G.A. Budiasih (2015) yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki SKPD, maka akan berdampak pada meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- ▶ Berpengaruh secara parsial
- - - - -▶ Berpengaruh secara simultan

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Analisis Deskriptif, Uji Validitas, dan Reliabilitas

Berikut penjabaran mengenai hasil tanggapan penilaian sejumlah 62 responden pada bagian pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung:

3.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

Tabel 3.1

Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

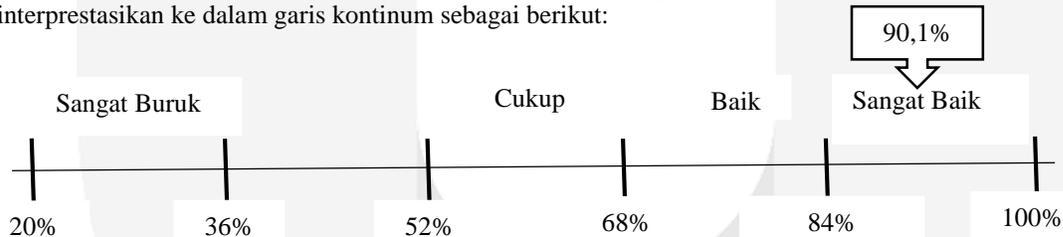
Indikator	No	Jawaban					Σ	Total Skor	Skor Ideal	%
		STS	TS	KS	S	SS				
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	1	0	0	0	27	35	62	279	310	90%
	2	0	1	0	28	33	62	278	310	89,7%
	3	0	0	0	32	30	62	277	310	89,4%
Proses akuntansi telah sesuai dengan prosedur Akuntansi Keuangan Daerah	4	0	0	0	27	35	62	282	310	91%
	5	0	2	0	25	35	62	281	310	90,6%
	6	0	1	0	27	34	62	276	310	89%
	7	0	1	0	26	35	62	280	310	90,3%
	8	0	1	0	30	31	62	276	310	89%
	9	0	1	0	20	41	62	286	310	92,2%
	10	0	2	0	23	37	62	280	310	90,3%
Jumlah Skor								2795		
Rata-Rata Skor								279,5	310	
Persentase Skor								90,1%		

Sumber: Data Primer yang telah diolah (2020)

Berdasarkan hasil pengolahan yang telah disajikan pada tabel 3.1, dapat dilihat bahwa jumlah skor total untuk Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) adalah 2795. Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- Nilai Indeks Maksimum = $5 \times 10 \times 62 = 3.100$
- Nilai Indeks Minimum = $1 \times 10 \times 62 = 620$
- Jarak Interval = $(\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) : 5$
 $= (3.100 - 620) : 5$
 $= 496$
- Presentase Skor = $(\text{total skor} : \text{nilai maksimum}) \times 100\%$
 $= (2795 : 3.100) \times 100\%$
 $= 90,1\%$

Selanjutnya hasil skor tanggapan responden terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diinterpretasikan ke dalam garis kontinum sebagai berikut:



Gambar 3.5

Garis Kontinum Skor Tanggapan Responden terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dalam tabel 3.1 dan gambar 3.1 mengenai tanggapan responden terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memperoleh nilai skor rata-rata sebesar 90,1%. Dari hasil nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berada dalam kategori sangat baik. Hal ini didukung dengan perolehan jawaban responden pada setiap indikator yang diberikan. Pada indikator Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa anggota bagian pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung telah menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, menerapkan basis akuntansi berbasis akrual, dan menggunakan mekanisme pelaporan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.

Indikator lainnya yang mendukung Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berada dalam kategori sangat baik adalah indikator proses akuntansi telah sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan daerah dan dapat diartikan bahwa anggota bagian pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung telah melaksanakan prosedur penerimaan, prosedur pengeluaran, prosedur akuntansi, transaksi keuangan, dan pengklasifikasian sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan daerah yang berlaku dengan baik dan benar.

3.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)

Tabel 3.2

Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)

Indikator	No	Jawaban					Σ	Total Skor	Skor Ideal	%
		STS	TS	KS	S	SS				
PSAP No. 1 Penyajian laporan keuangan	1	0	0	0	25	37	62	285	310	91,9%
	2	0	0	0	27	35	62	283	310	91,3%
PSAP No. 2 Laporan Realisasi Anggaran	3	0	0	0	34	28	62	276	310	89%
	4	0	1	0	31	30	62	270	310	87,1%
PSAP No. 3 Laporan Arus Kas	5	0	0	0	34	28	62	273	310	88,1%
	6	0	3	0	35	24	62	266	310	85,8%
PSAP No. 4 Catatan atas Laporan Keuangan	7	0	1	0	23	38	62	277	310	89,4%
	8	0	1	0	22	39	62	285	310	91,9%
PSAP No. 5 Akuntansi Persediaan	9	0	3	0	28	31	62	272	310	87,7%
	10	0	0	0	32	30	62	278	310	89,7%
PSAP No. 6 Akuntansi Investasi	11	0	4	0	33	25	62	265	310	85,5%
	12	0	6	0	32	24	62	260	310	83,9%
PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap	13	0	0	0	31	31	62	279	310	90%
	14	0	0	0	33	29	62	277	310	89,4%
PSAP No. 8 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan	15	0	1	0	38	23	62	269	310	86,8%
	16	0	1	0	36	25	62	270	310	87,1%
PSAP No. 9 Akuntansi Kewajiban	17	0	3	0	34	25	62	267	310	86,1%
	18	0	0	0	33	29	62	277	310	89,4%
	19	0	1	0	35	26	62	271	310	87,4%
PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan, dan Perubahan Estimasi Akuntansi	20	0	0	0	28	34	62	282	310	91%
	21	0	0	0	32	30	62	278	310	89,7%
	22	0	1	0	27	34	62	280	310	90,3%
PSAP No. 11 Laporan	23	1	6	0	30	25	62	258	310	83,2%

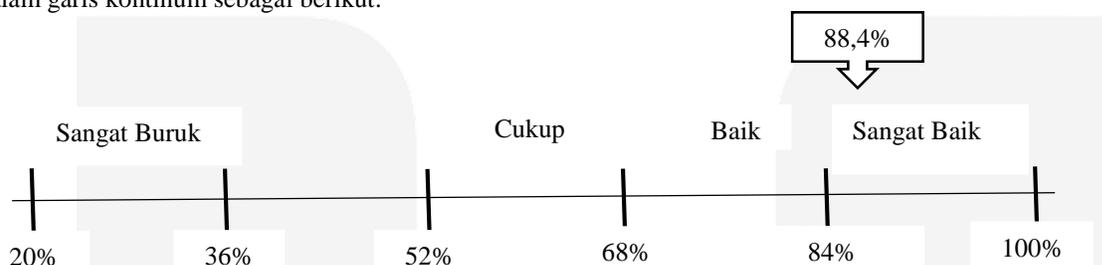
Keuangan Konsolidasi	24	0	4	0	31	27	62	267	310	86,1%
PSAP No. 12 Laporan Operasional	25	0	0	0	30	32	62	280	310	90,3%
	26	0	0	0	32	30	62	278	310	89,7%
Jumlah Skor								7123		
Rata-Rata Skor								274	310	
Persentase Skor								88,4%		

Sumber: Data primer yang sudah diolah (2020)

Berdasarkan hasil pengolahan yang telah disajikan pada tabel 3.2, dapat dilihat bahwa jumlah skor total untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) adalah 7123. Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- Nilai Indeks Maksimum = $5 \times 26 \times 62 = 8.060$
- Nilai Indeks Minimum = $1 \times 26 \times 62 = 1.612$
- Jarak Interval = $(\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) : 5$
 $= (8.060 - 1.612) : 5$
 $= 1.290$
- Presentase Skor = $(\text{total skor} : \text{nilai maksimum}) \times 100\%$
 $= (7123 : 8.060) \times 100\%$
 $= 88,4\%$

Selanjutnya hasil skor tanggapan responden terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan diinterpretasikan ke dalam garis kontinum sebagai berikut:



Gambar 3.2

Garis Kontinum Skor Tanggapan Responden terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dalam tabel 3.2 dan gambar 3.2 mengenai tanggapan responden terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan memperoleh nilai skor rata-rata sebesar 88,4%. Dari hasil nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berada dalam kategori sangat baik. Hal ini didukung dengan perolehan jawaban responden pada setiap indikator yang diberikan. Pada indikator PSAP No. 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan dan dapat diartikan bahwa anggota bagian pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung telah menerapkan basis akrual dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai prinsip dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan dengan sesuai. Pada indikator PSAP No. 2 mengenai Laporan Realisasi Anggaran dapat diartikan bahwa anggota bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung telah mencatat pendapatan sesuai asas bruto dan mengakui belanja saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas dengan benar. Pada indikator PSAP No. 3 mengenai Laporan Arus Kas dapat diartikan bahwa anggota bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung telah menyusun laporan arus kas sesuai dengan metode langsung berdasarkan aktivitas yang telah dilakukan.

Selanjutnya, pada indikator PSAP No. 4 mengenai Catatan atas Laporan Keuangan dapat diartikan bahwa anggota bagian pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung telah menyajikan dan memberikan informasi Catatan atas Laporan Keuangan agar mudah dipahami oleh semua pembaca. Pada indikator PSAP No. 5 mengenai Akuntansi Persediaan dapat diartikan bahwa anggota bagian pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung sudah mampu untuk mengakui persediaan dan pencatatan persediaan saat disajikan di dalam laporan keuangan. Pada indikator PSAP No. 6 mengenai Akuntansi Investasi dapat diartikan bahwa anggota pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung sudah mampu untuk mengakui kas yang dikeluarkan sebagai investasi dan mencatat investasi dengan baik dan benar. Pada indikator PSAP No. 7 mengenai Akuntansi Aset Tetap dapat diartikan bahwa anggota pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung sudah mampu untuk mengklasifikasikan dan mencatat aset sesuai dengan yang diperlukan. Pada indikator PSAP No. 8 mengenai Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan dapat diartikan bahwa anggota pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kota Bandung sudah dapat mengungkapkan informasi konstruksi yang dibutuhkan dan memindahkan konstruksi sebagai aset tetap setelah selesai.

Pada indikator PSAP No. 9 mengenai Akuntansi Kewajiban dapat diartikan bahwa anggota pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung sudah mampu untuk mengakui dan mencatat nilai kewajiban dengan baik dan benar. Pada indikator PSAP No. 10 mengenai Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan, dan Perubahan Estimasi Akuntansi dapat diartikan bahwa anggota pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung sudah mampu melakukan koreksi dan perbaikan atas kesalahan yang terjadi pada neraca berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada indikator PSAP No. 11 mengenai Laporan Keuangan Konsolidasi dapat diartikan bahwa anggota pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung telah mampu menyajikan laporan keuangan konsolidasi mencakup semua keuangan dari entitas akuntansi dengan baik untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang dituju. Pada indikator PSAP No. 12 mengenai Laporan Operasional dapat diartikan bahwa anggota pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung sudah mampu untuk menyusun laporan operasional yang mencakup pendapatan laporan operasional, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa pada periode akuntansi yang telah ditentukan.

3.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

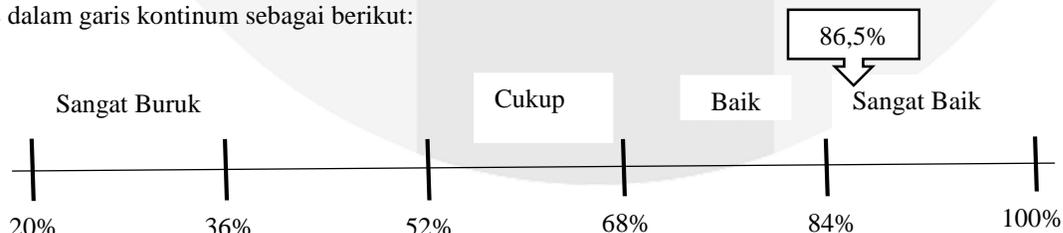
Tabel 3.3
Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)

Indikator	No	Jawaban					Σ	Total Skor	Skor Ideal	%
		STS	TS	KS	S	SS				
Pengetahuan	1	0	0	0	22	40	62	288	310	93%
	2	2	1	0	34	25	62	265	310	85,5%
	3	0	1	0	27	34	62	280	310	90,3%
	4	0	1	0	23	38	62	284	310	91,6%
Keterampilan	5	0	2	0	37	23	62	267	310	86,1%
	6	0	2	0	35	25	62	269	310	86,8%
	7	0	1	0	38	23	62	269	310	86,8%
Perilaku	8	0	0	0	24	38	62	286	310	92,3%
	9	0	0	0	28	34	62	282	310	91%
	10	20	17	0	17	8	62	162	310	52,3%
Jumlah Skor								2682	3100	
Rata-Rata Skor								268,2		
Persentase Skor								86,5%		

Berdasarkan hasil pengolahan yang telah disajikan pada tabel 3.3, dapat dilihat bahwa jumlah skor total untuk Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) adalah 2682. Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- Nilai Indeks Maksimum = $5 \times 10 \times 62 = 3.100$
- Nilai Indeks Minimum = $1 \times 10 \times 62 = 620$
- Jarak Interval = $(\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) : 5$
 $= (3.100 - 620) : 5$
 $= 496$
- Presentase Skor = $(\text{total skor} : \text{nilai maksimum}) \times 100\%$
 $= (2.682 : 3.100) \times 100\%$
 $= 86,5\%$

Selanjutnya hasil skor tanggapan responden terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia diinterpretasikan ke dalam garis kontinum sebagai berikut:



Gambar 3.3
Garis Kontinum Skor Tanggapan Responden terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dalam tabel 4.1 dan gambar 4.5 mengenai tanggapan responden terhadap kompetensi sumber daya manusia memperoleh nilai skor rata-rata sebesar 86,5%. Dari hasil nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berada dalam kategori sangat baik. Hal ini didukung dengan perolehan jawaban responden pada setiap indikator yang diberikan. Pada indikator pengetahuan mendapatkan nilai skor rata-rata sebesar 90,1% dan berada dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat diartikan bahwa anggota pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung telah memiliki pengetahuan mengenai meneliti kelengkapan SPP-LS barang dan jasa, verifikasi penerimaan, serta menyiapkan laporan keuangan dengan baik dan benar.

Kompetensi sumber daya manusia juga didukung oleh indikator keterampilan dengan nilai skor rata-rata sebesar 86,5% dan berada dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat diartikan bahwa anggota pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung sudah mampu dalam membuat dan memposting jurnal serta menyusun dan menyajikan neraca dengan baik sehingga mendapatkan kualitas pelaporan yang baik. Pada indikator perilaku dapat dilihat bahwa sebanyak 20 responden pada anggota pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung memilih sangat tidak setuju dan 17 responden tidak setuju terhadap pernyataan yang diberikan no. 3 dan dapat diartikan bahwa banyak anggota yang tidak setuju akan malasnya mengikuti pelatihan terkait penatausahaan laporan keuangan yang diberikan.

3.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 3.4

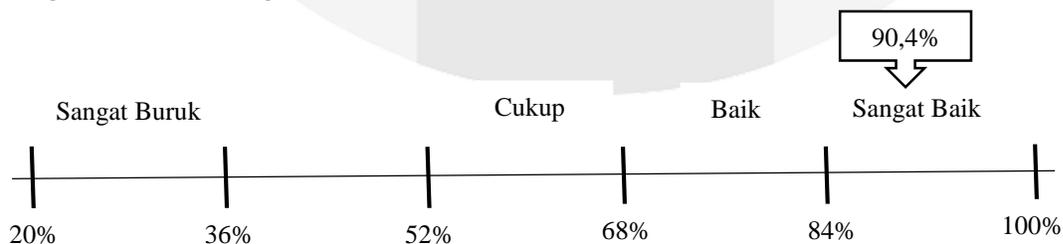
Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Indikator	No	Jawaban					Σ	Total Skor	Skor Ideal	%
		STS	TS	KS	S	SS				
Relevan	1	0	1	31	30	62	277	310	89,4%	89,4%
	2	0	0	23	39	62	287	310	92,6%	92,6%
	3	0	1	0	35	26	62	272	310	87,7%
	4	0	0	0	27	35	62	283	310	91,3%
Andal	5	0	0	0	26	36	62	284	310	91,6%
	6	0	2	0	29	31	62	275	310	88,7%
	7	0	0	0	29	33	62	281	310	90,6%
Dapat Dibandingkan	8	0	0	0	30	32	62	280	310	90,3%
Dapat Dipahami	9	0	0	0	28	34	62	279	310	90%
	10	0	0	0	24	38	62	283	310	91,3%
Jumlah Skor								2801		
Rata-Rata Skor								280,1	310	
Persentase Skor								90,4%		

Berdasarkan hasil pengolahan yang telah disajikan pada tabel 3.4, dapat dilihat bahwa jumlah skor total untuk Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah 2801. Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- Nilai Indeks Maksimum = $5 \times 10 \times 62 = 3.100$
- Nilai Indeks Minimum = $1 \times 10 \times 62 = 620$
- Jarak Interval = $(\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) : 5$
 $= (3.100 - 620) : 5$
 $= 496$
- Presentase Skor = $(\text{total skor} : \text{nilai maksimum}) \times 100\%$
 $= (2.801 : 3.100) \times 100\%$
 $= 90,4\%$

Selanjutnya hasil skor tanggapan responden terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah diinterpretasikan ke dalam garis kontinum sebagai berikut:



Gambar 3.4
Garis Kontinum Skor Tanggapan Responden terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Y)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dalam tabel 3.4 dan gambar 3.4 mengenai tanggapan responden terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memperoleh nilai skor rata-rata sebesar 90,4%. Dari hasil nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berada dalam kategori sangat baik. Hal ini didukung dengan perolehan jawaban responden pada setiap indikator yang diberikan. Pada indikator Relevan dapat disimpulkan bahwa anggota pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung sudah mampu dalam menyediakan informasi aktivitas keuangan pada masa lalu dan masa yang akan datang tepat waktu secara lengkap.

Pada indikator Andal dapat disimpulkan bahwa anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung sudah mampu dalam menghasilkan informasi mengenai laporan keuangan secara jujur apa adanya sehingga informasi yang dihasilkan jelas dan mudah dipahami oleh seluruh pengguna. Pada indikator Dapat Dibandingkan dapat diartikan bahwa anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung telah mampu dalam membandingkan laporan keuangan masa kini dengan masa lalu. Pada indikator Dapat Dipahami memperoleh nilai skor rata-rata sebesar 90,6% dan berada dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa anggota pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung telah mampu memberikan informasi mengenai penyusunan laporan keuangan secara jelas, terinci, dan sistematis agar mudah dipahami oleh semua pengguna.

3.1.5 Hasil Uji Validitas

Dalam pengujian validitas dari kuesioner yang sudah didapatkan akan menggunakan rumus korelasi *Person Product Moment* untuk mengetahui apakah hasil uji validitas akan valid atau tidak valid. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan responden sebanyak 62 responden sehingga $n = 62 - 2 = 60$ dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan didapatkan nilai r tabel sebesar 0,254. Berikut merupakan hasil uji validitas dari kuesioner yang sudah peneliti dapatkan:

Tabel 3.5
Rekapitulasi Uji Validitas

No.	Variabel	r Hitung	r Tabel	Keterangan
X1.1	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	0,736	0,254	Valid
X1.2		0,767	0,254	Valid
X1.3		0,734	0,254	Valid
X1.4		0,733	0,254	Valid
X1.5		0,712	0,254	Valid
X1.6		0,804	0,254	Valid
X1.7		0,748	0,254	Valid
X1.8		0,873	0,254	Valid
X1.9		0,765	0,254	Valid
X1.10		0,843	0,254	Valid
X2.1	Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)	0,710	0,254	Valid
X2.2		0,759	0,254	Valid
X2.3		0,605	0,254	Valid
X2.4		0,605	0,254	Valid
X2.5		0,628	0,254	Valid
X2.6		0,754	0,254	Valid
X2.7		0,845	0,254	Valid
X2.8		0,609	0,254	Valid
X2.9		0,809	0,254	Valid
X2.10		0,829	0,254	Valid
X2.11		0,669	0,254	Valid
X2.12		0,639	0,254	Valid
X2.13		0,772	0,254	Valid
X2.14		0,747	0,254	Valid
X2.15		0,833	0,254	Valid

X2.16	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	0,606	0,254	Valid	
X2.17		0,715	0,254	Valid	
X2.18		0,781	0,254	Valid	
X2.19		0,821	0,254	Valid	
X2.20		0,742	0,254	Valid	
X2.21		0,780	0,254	Valid	
X2.22		0,782	0,254	Valid	
X2.23		0,527	0,254	Valid	
X2.24		0,634	0,254	Valid	
X2.25		0,841	0,254	Valid	
X2.26		0,835	0,254	Valid	
X3.1		0,874	0,254	Valid	
X3.2		0,408	0,254	Valid	
X3.3		0,726	0,254	Valid	
X3.4		0,718	0,254	Valid	
X3.5		0,659	0,254	Valid	
X3.6		0,744	0,254	Valid	
X3.7		0,728	0,254	Valid	
X3.8		0,742	0,254	Valid	
X3.9		0,728	0,254	Valid	
X3.10		0,409	0,254	Valid	
X3.11		0,874	0,254	Valid	
X3.12		0,408	0,254	Valid	
X3.13		0,726	0,254	Valid	
Y.1		Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,605	0,254	Valid
Y.2			0,799	0,254	Valid
Y.3	0,527		0,254	Valid	
Y.4	0,776		0,254	Valid	
Y.5	0,803		0,254	Valid	
Y.6	0,741		0,254	Valid	
Y.7	0,815		0,254	Valid	
Y.8	0,758		0,254	Valid	
Y.9	0,829		0,254	Valid	
Y.10	0,781		0,254	Valid	

Sumber: Data Proses yang telah diolah SPSS 25.0 (2020)

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, dapat diketahui bahwa hasil perhitungan dari setiap pertanyaan variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1), Standar Akuntansi Pemerintahan (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3), dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) memiliki nilai r hitung lebih besar dari 0,254 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan pada variabel tersebut adalah valid.

3.1.6 Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian akan dikatakan reliabel apabila nilai angka *Cronbach Alpha* > 0,60. Berikut merupakan hasil uji reliabilitas dari kuesioner yang sudah peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Uji Perhitungan	Indeks Kritis	Keterangan
1.	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	0,924	0,60	Reliabel
2.	Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)	0,958	0,60	Reliabel
3.	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	0,776	0,60	Reliabel

4.	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,907	0,60	Reliabel
----	---	-------	------	----------

Sumber: Data Proses yang telah diolah SPSS 25.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa hasil perhitungan dari setiap pertanyaan variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1), Standar Akuntansi Pemerintahan (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3), dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) memiliki nilai Alpha lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan pada variabel tersebut adalah reliabel.

3.2 Pembahasan
3.2.1 Uji Normalitas

Tabel 3.7
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,15847914
Most Extreme Differences	Absolute	,105
	Positive	,105
	Negative	-,092
Test Statistic		,105
Asymp. Sig. (2-tailed)		,085 ^c

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber; Data Primer yang telah diolah SPSS 25.0 (2020)

Berdasarkan tabel 3.7 setelah dilakukan pengujian normalitas data dengan mengoulier sebanyak 20 responden sehingga tersisa 42 responden dari jumlah total 62 responden didapatkan hasil dengan nilai Asymp. Sig 0,085 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut dapat digunakan karena berdistribusi secara normal.

3.2.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 3.8
Hasil Uji Multikolinearitas

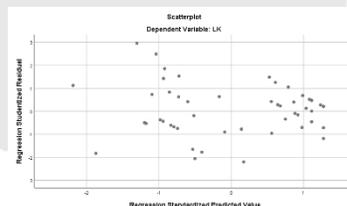
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.591	3.161		2.718	,009		
	SAKD	,542	,110	,611	4.946	,000	,322	3.107
	SAP	,053	,052	,148	1.015	,314	,232	4.315
	KSDM	,140	,102	,148	1.373	,175	,419	2.385

a. Dependent Variable: LK

Sumber: Data Primer yang telah diolah IBM SPSS 25.0 (2020)

Berdasarkan nilai dari tabel 3.8 didapatkan nilai Tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF tidak lebih dari 10,00. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.

3.2.3 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang telah diolah SPSS 25.0 (2020)

Berdasarkan gambar 3.5 diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak diatas angka 0 maupun dibawah angka 0. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian yang diperoleh tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Model regresi ini layak untuk dipakai dalam memprediksi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

3.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3.9
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.591	3.161		2.718	.009		
	SAKD	.542	.110	.611	4.946	.000	.322	3.107
	SAP	.053	.052	.148	1.015	.314	.232	4.315
	KSDM	.140	.102	.148	1.373	.175	.419	2.385

a. Dependent Variable: LK

Sumber: Data Primer yang telah diolah IBM SPSS 25.0 (2020)

Berdasarkan hasil pengujian yang didapatkan pada tabel 3.9 didapatkan nilai a (konstanta) sebesar 11,380 serta nilai koefisien regresi b₁ 0,542, b₂ 0,053, dan b₃ 0,140 sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 11,380 + 0,542SAKD + 0,053SAP + 0,140KSDM$$

Persamaan tersebut dapat menggambarkan apabila diperkirakan variabel bebas (X) naik sebesar satu unit dan variabel bebas lainnya diperkirakan konstanta atau sama dengan 0, maka nilai variabel terikat (Y) diperkirakan dapat naik atau turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya.

- a = 11,380 artinya jika variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia bernilai konstan, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 11,380.
- b₁ = 0,542 artinya jika Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meningkat sebesar satu satuan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan ikut naik sebesar 0,542. Dapat disimpulkan bahwa kesuksesan dari Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah akan mempengaruhi kesuksesan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b₂ = 0,053 artinya jika Standar Akuntansi Pemerintahan meningkat sebesar satu satuan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan ikut naik sebesar 0,053. Dapat disimpulkan bahwa kesuksesan dari Standar Akuntansi Pemerintahan akan mempengaruhi kesuksesan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b₃ = 0,140 artinya jika Kompetensi Sumber Daya Manusia meningkat sebesar satu satuan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan ikut naik sebesar 0,140. Dapat disimpulkan bahwa kesuksesan dari Kompetensi Sumber Daya Manusia akan mempengaruhi kesuksesan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.2.5 Uji F

Tabel 3.10
Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	714.847	3	238.282	48.629	.000 ^b
	Residual	284.201	58	4.900		
	Total	999.048	61			

a. Dependent Variable: LK

b. Predictors: (Constant), KSDM, SAKD, SAP

Sumber: Data Primer yang telah diolah IBM SPSS 25.0 (2020)

Berdasarkan hasil pada tabel 3.10 tersebut diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara Penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung.

3.2.6 Analisis Determinasi (R²)

Tabel 3.11
Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.846 ^a	.716	.701	2.214

a. Predictors: (Constant), KSDM, SAKD, SAP

Sumber: Data Primer yang telah diolah IBM SPSS 25.0 (2020)

Berdasarkan tabel 3.11 diatas, dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,846 atau 84,6%. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa semua variabel independen (bebas) mampu mempengaruhi keputusan dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 84,6%, sedangkan sisanya 25,4% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

3.2.7 Uji t

Tabel 3.12
Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.591	3.161		2.718	.009
	SAKD	.542	.110	.611	4.946	.000
	SAP	.053	.052	.148	1.015	.314
	KSDM	.140	.102	.148	1.373	.175

a. Dependent Variable: LK

Sumber: Data Primer yang diolah IBM SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 3.12 diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem akuntansi keuangan daerah.
Tingkat signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$), maka penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Standar akuntansi pemerintahan.
Tingkat signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,314 ($0,314 > 0,05$), maka standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Kompetensi sumber daya manusia.
Tingkat signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,175 ($0,175 > 0,05$), maka kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian mengenai “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang didapatkan dari pernyataan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang didapatkan dari tanggapan responden , maka:
 - a. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada bagian pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung memperoleh rata-rata skor sebesar 90,1% dan berada dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa anggota bagian pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah mampu dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 serta melaksanakan prosedur akuntansi sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan daerah yang sudah diterapkan dengan baik.
 - b. Standar akuntansi pemerintahan pada “penyajian laporan keuangan” memiliki presentase skor yang paling tinggi yaitu sebesar 91,9% dan 91,3% pada setiap pernyataan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator “penyajian laporan keuangan” memiliki pengaruh yang paling tinggi terhadap standar akuntansi

- pemerintahan. Namun, pada indikator “laporan keuangan konsolidasi” memiliki presentase skor yang rendah yaitu sebesar 83,2%.
- c. Kompetensi sumber daya manusia pada indikator “pengetahuan” memiliki presentase skor yang paling tinggi sebesar 90,1%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator “pengetahuan” memiliki pengaruh yang paling tinggi terhadap kompetensi sumber daya manusia. Namun, pada indikator “perilaku” memiliki presentase skor yang rendah terhadap pernyataan No. 10 sebesar 67,7%.
 - d. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada bagian pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung memperoleh rata-rata skor sebesar 90,4% dan berada dalam kategori baik. Hal ini dapat diartikan bahwa anggota pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung telah berhasil dalam menerapkan indikator relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.
2. Berdasarkan hasil perhitungan pengujian uji F yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung).
 3. Berdasarkan hasil perhitungan pengujian uji t yang telah dilakukan, maka didapatkan:
 - a. Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
 - b. Standar akuntansi pemerintahan tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
 - c. Kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung), maka didapatkan saran yang akan diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
 - a. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dan menambah jumlah responden pada satuan kerja pemerintah daerah lainnya.
 - b. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mempersiapkan waktu dengan sangat baik sehingga ketika situasi sedang terjadi pandemi atau masalah dapat diselesaikan dengan tepat waktu agar tidak menghambat proses penelitian.
 - c. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan variabel lain yang tidak digunakan didalam penelitian ini.
 - d. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan dapat memastikan hasil dari pengujian dengan teliti.
 - e. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dan sangat diharapkan untuk memberikan saran kembali.
2. Aspek Praktis
 - Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan satuan kerja perangkat daerah bagian pengelola keuangan pemerintah daerah lebih konsisten dalam penerapan sistem akuntansi keuangan yang telah sesuai dengan prosedur standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
 - Disarankan untuk satuan kerja perangkat daerah bagian pengelola keuangan pemerintah daerah dapat memperhatikan dan memahami mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang sudah diwajibkan untuk digunakan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Glynn JJ, 1993, *Public Sector Financial Control and Accounting*, 2nd Edition, Oxford Blackwill.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hasibuan, Malayu S.P.. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P.. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hery. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 1. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Services.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. [Online]. kbbi.kemdikbud.go.id
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual*.
- Sinurat, Marja. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susilawati dan Maya R Atmawinata. 2014. *Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit: Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Etikonomi, Volume 13 Nomor 2.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. Jakarta: 2003.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.